

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban pemeliharaan sistem drainase di Kelurahan Jondul Rawang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan. Bentuk pemeliharaan yang dilakukan antara lain berupa pembersihan saluran drainase, pengerukan sedimen, serta perbaikan saluran pada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Selain itu, pemerintah kelurahan juga berperan dalam memfasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat sebagai upaya menjaga kebersihan saluran drainase di lingkungan permukiman, tetapi pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih sering terjadinya genangan dan banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan kapasitas saluran drainase yang ada, kepadatan permukiman yang tinggi, serta masih adanya bangunan yang berada di sekitar atau di atas saluran air sehingga menghambat aliran air. Dengan demikian, meskipun secara normatif kewajiban pemeliharaan drainase telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya banjir di Kelurahan Jondul Rawang.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemeliharaan sistem drainase dan pengendalian banjir di Kelurahan Jondul Rawang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor teknis maupun faktor sosial. Faktor teknis meliputi kondisi geografis wilayah yang relatif rendah, keterbatasan kapasitas jaringan drainase,

keterbatasan lahan untuk pengembangan sistem drainase,serta melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur drainase secara menyeluruh. Selain itu, terdapat pula faktor utama yaitu, perilaku masyarakat yang memperburuk kondisi drainase, masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran air sehingga menyebabkan penyumbatan dan menghambat aliran air. Kondisi ini menyebabkan kapasitas saluran drainase semakin berkurang dan meningkatkan potensi terjadinya genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase, pelaksanaan pengendalian banjir di Kelurahan Jondul Rawang masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara optimal.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Padang, diharapkan dapat meningkatkan upaya pemeliharaan dan perbaikan sistem drainase secara lebih optimal, terutama pada wilayah yang tergolong rawan banjir seperti Kelurahan Jondul Rawang. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pembangunan di kawasan permukiman agar tidak mengganggu fungsi saluran drainase yang telah ada. Selain itu, diperlukan peningkatan perencanaan pengembangan jaringan drainase yang lebih terpadu agar kapasitas saluran dapat menampung aliran air hujan secara lebih efektif. Pemerintah kelurahan juga diharapkan dapat terus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase sebagai upaya pencegahan banjir di Jondul Rawang.

2. Masyarakat Kelurahan Jondul Rawang diharapkan lebih sadar dan bertanggung jawab menjaga kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan. Partisipasi aktif dalam gotong royong penting untuk mencegah penyumbatan. Selain itu, masyarakat harus mematuhi aturan tata ruang dan melaporkan pelanggaran yang mengganggu fungsi drainase kepada kelurahan.

